



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 14 September 2017

Halaman: 9

Kawasan Kumuh Yogya Tinggal 176,9 Hektare

UMBULHARJO (MERAPI) - Kawasan kumuh di Kota Yogyakarta kini masih tersisa sekitar 176,9 hektare. Meski demikian Pemkot Yogyakarta mengupayakan memenuhi target nol persen kawasan kumuh yang menjadi bagian dari target nasional 100-0-100 yakni 100 persen pemenuhan sanitasi, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses air bersih pada 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad menyebut, luas awal kawasan kumuh di Kota Yogyakarta 264,9 hektare atau 5,44 persen dari luas wilayah Yogyakarta. Luasan kawasan kumuh yang sudah tertangani sekitar 88 hektare di tahun 2016, sehingga masih tersisa sekitar 176,9 hektare.

"Kawasan kumuh yang tersisa tersebar di 13 kecamatan. Hanya kecamatan Kraton yang tidak masuk kawasan kumuh. Penanganan kawasan kumuh dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan pemkot," kata Edy, Rabu (13/9).

Dia menjelaskan, kawasan kumuh dengan luas lebih dari 15 hektare ditangani oleh pemerintah pusat yakni di 9 kecamatan. Sedangkan kawasan kumuh 5 hingga 15 hektare ditangani Pemda DIY yaitu di Kecamatan Wirobrajan dan Gedongtengen. Sementara Pemkot Yogyakarta menangani kawasan kumuh kurang dari 5 hektare yakni di Kecamatan Pakualaman dan Gondomanan.

"Kami berupaya dan optimis memenuhi target itu di tahun 2019. Pemerintah juga terus mengajak keterlibatan masyarakat menangi kawasan kumuh," tambahnya.

Dia menyampaikan untuk target 100-0-100 dari sisi sanitasi ada beberapa indikator yang sudah mencapai target dan adanya belum. Sanitasi yang dinilai belum terpenuhi terkait tempat buang air besar atau jamban. Dari total 131.516 jamban yang ada di masyarakat Kota Yogyakarta, 1.457 jamban atau 1,26 persen tidak aman. "Tidak aman itu berarti tidak layak dan sehat. Misalnya tidak dilengkapi dengan *septic tank*," ujar Edy.

Sedangkan untuk akses air bersih, dia menyatakan sudah dapat diakses oleh sekitar 98,5 persen warga. Namun dari jumlah itu baru 98,66 persen sumur milik warga yang memenuhi syarat kesehatan.

(Tri)-a

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Badan Perencanaan Pembangunan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005